

**EVALUASI DAMPAK PROGRAM PEMBERIAN
BANTUAN NON TUNAI PADA PELAKU
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Dalam Memenuhi Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**Dimas Eko Prasetyo
07011281823064**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
Juli 2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dimas Eko Prasetyo
NIM : 07011281823064
Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 21 Oktober 2000
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Analisis Dampak Program Pemberian Bantuan Non Tunai Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun diperguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 30 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Dimas Eko Prasetyo

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

ANALISIS DAMPAK PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN NON TUNAI PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA PALEMBANG

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Dimas Eko Prasetyo

07011281823064

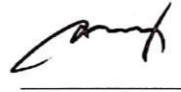
Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

1. Drs. Mardianto, M.Si.

NIP. 19621125 198912 1 001



29 Juni 2022

Pembimbing II

2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si.

NIP. 19810608 200812 2 002



21 Juni 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



D. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

EVALUASI DAMPAK PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN NON TUNAI PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA PALEMBANG

Skripsi

Oleh :
DIMAS EKO PRASETYO
07011281823064

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 13 Juli 2022

Pembimbing :

1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

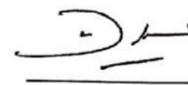
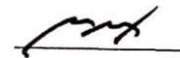
2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Penguji

1. Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 197808182009121002

2. Anang Dwi Santoso, S.A.P., M.A.P
NIP. 199310072019031012

Tanda Tangan



Tanda Tangan



Mengetahui,



Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004



Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“It's not about if I can! I do because I want to do”

- Eiichiro Oda

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kepada Orang tua ku,
Ayahku M. Suhadi dan Ibuku Sulistiningsih
2. Ketiga adikku, Alfi, Rakha, dan Vania.
3. Kepada yang selalu menemani saya, Enjelia R.
Salsabilla
4. Kepada teman-teman seperjuangan Angkatan
2018
5. Seluruh dosen yang saya hormati dan bersabar
dalam membimbing saya
6. Almamater Kebanggaanku

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Program Pemberian Bantuan Non Tunai Kepada Pelaku UMKM di Kota Palembang, latar belakang penelitian ini adalah ingin melihat dampak dari program bantuan non tunai ini pada pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan. Sehingga perlu dilakukan penelitian tentang evaluasi dampak dari program pemberian bantuan non tunai pada pelaku UMKM di Kota Palembang dengan menggunakan teori evaluasi William N. Dunn, berdasarkan teori tersebut indikator yang digunakan untuk mengukur dampak suatu program berjalan dengan baik atau tidak terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dari penelitian ini bahwa dampak yang dirasakan pelaku UMKM dari pemberian bantuan non tunai sudah efektif, efisien, tepat, dan pelaku UMKM merasa tercukupi dengan bantuan tersebut. Tetapi, dalam pelaksanaan bantuan non tunai masih kurang pemerataannya karena jumlah bantuan dengan jumlah UMKM di Kota Palembang berbeda yang menyebabkan tidak semua UMKM mendapatkan bantuan non tunai tersebut, akibatnya belum bisa memenuhi standar indikator perataan, kemudian pada indikator responsivitas banyak pelaku UMKM yang kecewa karena tidak mendapatkan bantuan dan ada yang hanya menginginkan bantuan tetapi tidak sesuai dengan jenis usahanya. Hasil dari penelitian ini merekomendasikan pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang harus mendaftarkan secara keseluruhan dari kebutuhan para pelaku UMKM sehingga bisa dibantu sesuai kebutuhan produksinya, serta pihak pemerintah Kota Palembang lebih memperhatikan UMKM yang sedang berkembang untuk dibantu perkembangannya, sedangkan untuk pelaku UMKM harus meningkatkan potensi dari produk mereka menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Dampak Kebijakan, Bantuan Non Tunai, Usaha Mikro Kecil Menengah

Pembimbing I


Drs. Mardianto, M.Si.
NIP. 19621125 198912 1 001

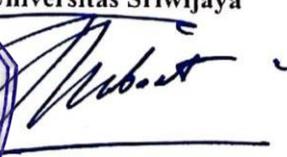
Pembimbing II


Dwi Mirani, S.IP., M.Si.
NIP. 19810608 200812 2 002

Indralaya, Juli 2022

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya




Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the impact of the non-cash assistance program for MSME actors in the city of Palembang, the background of this research was to see the impact of this non-cash assistance program on MSME actors who received assistance. So it is necessary to research the evaluation of the impact of the program of providing non-cash assistance to MSME actors in the city of Palembang using the William N. Dunn evaluation theory, based on this theory the indicators used to measure the impact of a program running well or not consisting of effectiveness, efficiency, adequacy, evenness, responsiveness, and accuracy. The method used in this research is a qualitative method with a qualitative descriptive approach. Based on the results of data analysis conducted in this study, the impact felt by MSME actors from providing non-cash assistance was effective, efficient, and appropriate, and MSME actors felt fulfilled with the assistance. However, in the implementation of non-cash assistance, the distribution is still lacking because the amount of assistance with the number of MSMEs in Palembang City is different which causes not all MSMEs to receive non-cash assistance, as a result, they have not been able to meet the leveling indicator standards. get help and some just want help but not according to the type of business. The results of this study recommend that the Palembang City Cooperatives and SMEs Office must collect data as a whole from the needs of MSME actors so that they can be assisted according to their production needs, and the Palembang City government pays more attention to MSMEs that are developing to be assisted in their development, while MSME actors must increase their potential. of their products for the better.

Keyword: Impact of Policy, Non-Cash Assistance, Micro, Small and Medium Enterprises

Advisor I

Drs. Mardianto, M.Si.
NIP. 19621125 198912 1 001

Advisor II

Dwi Mirani, S.IP., M.Si.
NIP. 19810608 200812 2 002

Indralaya, July 2022

Head Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberi rahmat, karunia dan ridho-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar tanpa hambatan. Skripsi ini berjudul “Efektivitas Pengawasan Dampak Lingkungan Akibat Limbah Perusahaan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (SI) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Sebab itulah dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak M. Suhadi dan Ibu Sulistiningsih, ketiga adik penulis M. Alfi Wiratama, Rakha Naufal Muzakky, dan Belvania Renada Putri, serta seorang yang spesial Enjelia R. Salsabilla yang selalu ada untuk mendoakan, mendukung, dan memberi semangat kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik periode 2018-2022.

6. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik periode 2018-2022 sekaligus dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan hingga saat ini.
7. Bapak Drs. Mardianto, M.Si. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mencurahkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mencurahkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan bantuan selama perkuliahan dan seluruh karyawan FISIP yang telah membantu pada masa perkuliahan.
10. Ibu Hj. Sulhijawati, SE., M.Si. selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.
11. Ibu Devi Anggraini, S.Si., MM. selaku Kasi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.
12. Seluruh pegawai dan staff Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.
13. Bapak Ruda Ermansyah selaku Ketua Komunitas UKM-IKM Nusantara beserta anggotanya.
14. Ibu Komariah, SE. selaku Ketua Komunitas Gapehamm beserta anggotanya.
15. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung penulis proposal penelitian, Penulis ucapkan terima kasih semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada kita semua.

Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridha dan rahmat-Nya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini dan penulis mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan kesalahan dalam tulisan ini.

Atas segala bantuan dan perhatiannya saya ucapkan terimakasih. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, para mahasiswa, akademisi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, serta para pelaku UMKM di Kota Palembang dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama.

Indralaya, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kebijakan Publik.....	9
B. Evaluasi Kebijakan	11
C. Model Evaluasi Kebijakan.....	15
D. Model Evaluasi yang digunakan pada penelitian	17
E. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	19
F. Bantuan UMKM.....	21
G. Penelitian Terdahulu.....	23
H. Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Definisi Konsep	32
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data	34

E. Informan Penelitian.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum.....	39
1. Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.....	39
2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang.....	53
3. Program Bantuan Non-Tunai Kepada Pelaku UMKM di Kota Palembang...	53
B. Hasil dan Pembahasan	54
1. Efektivitas	54
2. Efisiensi	59
3. Kecukupan.....	62
4. Perataan	64
5. Responsivitas	67
6. Ketepatan.....	72
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Penerima Bantuan Alat dari Pemerintah Kota Palembang Kepada UMKM Melalui Komunitas di Kota Palembang	5
Tabel 2. Daftar Penerima Website dari Pemerintah Kota Palembang Kepada UMKM Melalui Komunitas di Kota Palembang	6
Tabel 3. Kriteria Evaluasi William N. Dunn	19
Tabel 4. Metodologi Untuk Evaluasi Program	22
Tabel 5. Beberapa Program Bantuan Non-Tunai.....	23
Tabel 6. Penelitian Terdahulu	24
Tabel 7. Fokus Penelitian	34
Tabel 8. Data Komunitas UMKM Penerima Bantuan Peralatan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang	64
Tabel 9. Perbandingan Jumlah UMKM dengan bantuan yang diberikan	65
Tabel 10. Matriks Hasil Penelitian	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Kebijakan Publik Menurut William N. Dunn (2003).....	11
Gambar 2. Kerangka Berpikir.....	31
Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang	42
Gambar 4. Acara Penyerahan Bantuan Non Tunai Berupa Peralatan Kepada UMKM.....	55
Gambar 5. Inovasi Kemasan Makanan	61
Gambar 6. Contoh Pempek Setelah Proses Vakum.....	61
Gambar 7. Ibu Dede Penerima Bantuan Alat Pendingin (<i>Freezer</i>)	63
Gambar 8. Surat Bantuan Peralatan Untuk UMKM Kota Palembang.....	68
Gambar 9. Ibu Erna Penerima Bantuan Mixer Food	69
Gambar 10. Kegiatan Observasi dan Sidak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang...	71
Gambar 11. Kak Vikram Penerima Bantuan Impulse Sealer.....	73

DAFTAR SINGKATAN

1. **Bappeda Litbang**: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2. **Covid-19** : *Corona Virus Disease 2019*
3. **DID** : Dana Insentif Daerah
4. **PDB** : Produk Domestik Bruto
5. **Permenkop** : Peraturan Menteri Koperasi
6. **UKM** : Usaha Kecil dan Menengah
7. **UMKM** : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	84
Lampiran 2. Surat Tugas Pembimbing Skripsi	86
Lampiran 3. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	87
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Seminar Proposal.....	88
Lampiran 5. Lembar Revisi Seminar Proposal.....	90
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi.....	91
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor industri yang tidak terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Pernyataan ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan sektor yang dapat diperhitungkan untuk meningkatkan kekompetitifan pasar dan stabilitas sistem ekonomi yang ada. Pokok permasalahan dalam ekonomi makro adalah pengangguran dan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi. Peran UMKM dalam hal ini diantaranya untuk mengurangi pengangguran, UMKM juga memiliki kontribusi dalam menaikkan pendapatan nasional melalui pembayaran pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM (Mariana & Lisda, 2015).

UMKM menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Menurut data, sebanyak kurang lebih 90% usaha yang ada di dunia merupakan kontribusi dari UMKM (Lubis & Junaidi, 2016). UMKM ialah gabungan dari beberapa pelaku ekonomi terbesar yang ada dalam sistem perekonomian Indonesia. UMKM juga dapat dijadikan sebagai peluang kerja yang cukup menjanjikan bagi calon pekerja di Indonesia yang memiliki permasalahan pekerjaan akibat kurangnya lapangan pekerjaan sehingga kesulitan mencari pekerjaan, terutama pada era globalisasi seperti sekarang ini (Setiyawati & Hermawan, 2018). Hal inilah yang membuat orang-orang khususnya masyarakat di Indonesia yang dikategorikan sebagai negara berkembang banyak membuka usaha-usaha dengan tujuan selain menambah penghasilan pribadi, juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi para tenaga kerja yang sedang mencari dan membutuhkan pekerjaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, tujuan dari pemberdayaan UMKM adalah untuk (1) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan, (2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan (3) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, total pelaku UMKM di Indonesia ialah 99,99% dari total pelaku usaha di Indonesia atau sebesar 64,2 juta. Daya serap tenaga kerja UMKM di Indonesia sebesar 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha atau senilai 117 juta pekerja. Sementara itu sumbangsih UMKM kepada perekonomian nasional (PDB) sebanyak 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang totalnya hanya sebanyak 5.550 atau 0,01% dari total pelaku usaha. UMKM tersebut dikuasai oleh pelaku usaha mikro yang totalnya 98,68% dengan daya serap tenaga kerja kurang lebih 89%. Sementara itu kontribusi usaha mikro terhadap PDB hanya berjumlah kurang lebih 37,8% (Puspitasari, 2021).

Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan UMKM di Indonesia digambarkan akan terus mengalami peningkatan serta akan menjadi salah satu faktor pendorong yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Basis konsumsi merupakan hal yang memegang peran paling penting terhadap kesinambungan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Basis konsumsi yang tinggi akan menjadi penopang bagi UMKM di Indonesia, tidak hanya pertumbuhan UMKM saja, akan tetapi juga pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Pertumbuhan UMKM akan berpengaruh pada angka penyerapan tenaga kerja, semakin banyak UMKM maka angka penyerapan tenaga

kerja akan semakin tinggi. Hasil menunjukkan bahwa, UMKM lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan usaha-usaha besar yang ada di Indonesia (Krisnawati, 2018). UMKM sebagai bagian dari perekonomian juga harus lebih meningkatkan daya saing dengan melakukan inovasi. Keunggulan dalam bersaing berbasis inovasi dan kreativitas harus lebih diutamakan karena mempunyai daya tahan dan jangka waktu lebih panjang (Suci, 2017).

UMKM tidak hanya banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia namun juga banyak memberikan bantuan kepada pemerintah terutama lapangan kerja serta permasalahan lainnya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk memperlancar dan mengembangkan UMKM di Indonesia, pemerintah Indonesia diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan UMKM. Kontribusi tersebut dapat berupa:

1. Lembaga Keuangan sebagai pembantu dana.
2. Penyediaan peralatan seperti mesin produksi dan peralatan penunjang lainnya. Sehingga pelaku UMKM diharapkan mampu melakukan peningkatan terhadap usahanya.
3. Pemasaran Produk. UMKM rata-rata hanya memasarkan produknya di sekitar daerahnya saja, padahal kualitas produk yang dihasilkan sudah mampu bersaing dengan produk internasional untuk diekspor. Oleh sebab itu, salah satu kontribusi pemerintah ialah dengan menyediakan website dan marketplace untuk membantu dalam hal pemasaran dan promosi produk UMKM (Hasmirah, 2017).

UMKM termasuk salah satu industri yang memiliki perkembangan yang pesat di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang. UMKM merupakan salah satu industri yang memiliki potensi tinggi untuk terus melakukan perkembangan dan inovasi serta

mampu bersaing dengan pasar internasional saat ini, untuk mendukung hal tersebut maka dibutuhkanlah dorongan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan untuk mendorong para pelaku UMKM menyelesaikan hal tersebut (Mirani et al., 2021).

Pelaksanaan program bantuan kepada UMKM telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Permenkop RI) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah yang menjelaskan bahwa aturan ini dibuat dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan sektor Koperasi dan UKM.

Berdasarkan tingkat produktivitas dan kebutuhan dalam meningkatkan usaha dan mengembangkan produk UMKM, pemberian bantuan secara tunai maupun non tunai merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam membantu para pelaku UMKM menjalankan usahanya. Pemberian bantuan kepada para pelaku UMKM melalui program bantuan langsung tunai maupun non tunai diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM yang kesulitan untuk mengembangkan dan mempromosikan produknya.

Salah satu program yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM yaitu berupa Bantuan Langsung Non-Tunai. Program ini merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan subsidi berupa peralatan kepada masyarakat pelaku UMKM yang membutuhkan. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 banyak sekali masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya karena dirumahkan, perusahaan tempat bekerja bangkrut, dan pendapatan pelaku UMKM menurun drastis sejak pandemi Covid-19 dimulai. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan bantuan berupa dana maupun kebutuhan pangan, alat, dan bahan bagi para pelaku UMKM (Nurahmawati & Hartini, 2020).

Bentuk dari bantuan langsung non tunai yang ada di Kota Palembang ialah berupa penyediaan peralatan produksi dan website untuk pemasaran dan promosi. Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang pada Selasa, 28 Juli 2020 di ruang rapat Bappeda Litbang Lt. 3 Kota Palembang tentang Penyusunan Anggaran Terkait Belanja Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Kota Palembang TA 2020, pemerintah Kota Palembang mengeluarkan surat tentang Bantuan Peralatan Untuk UMKM Kota Palembang dengan nomor surat 632/KUKM.V/2020. Pada poin 2 dijelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan diberikan bantuan berupa : Mixer Food, Mesin Jahit, Freezer, Mesin Bordir dan Impulse Sealer yang akan dibagikan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui komunitas dengan format kriteria dan kuota masing-masing komunitas. Selain pemberian bantuan yang telah dijelaskan pada poin 2 tersebut, pemerintah Kota Palembang juga memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM berupa website untuk pemasaran dan promosi produk UMKMinya. Adapun rincian pemberian bantuan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Daftar Penerima Bantuan Alat dari Pemerintah Kota Palembang Kepada UMKM Melalui Komunitas di Kota Palembang

No	Nama Komunitas	Nama Barang					Jumlah
		Mixer Food	Mesin Jahit	Freezer	Mesin Border	Impulse Sealer	
		Banyaknya					
1	ASPPEK	5		3		25	33
2	APENKUP	5		3		25	33
3	WPPI	5	5	3	2	25	40
4	AKUMINDO	5	5	3	2	25	40
5	GAPEHAMM	5	5	3	2	25	40
6	UKM-IKM NUSANTARA	5	5	3	2	25	40
TOTAL		30	20	18	8	150	226

Sumber : Dokumen Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang, 2020

**Tabel 2. Daftar Penerima Website dari Pemerintah Kota Palembang
Kepada UMKM Melalui Komunitas di Kota Palembang**

No	Nama Komunitas	Jumlah
1	ASPPEK	15
2	APENKUP	20
3	WPMI	15
4	AKUMINDO	15
5	GAPEHAMM	20
6	UKM-IKM NUSANTARA	15
Total		100

Sumber : Dokumen Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang, 2020

Berdasarkan dokumen dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang tahun 2020, terdapat 226 UMKM yang menerima bantuan peralatan yang terbagi ke dalam 6 Komunitas, sedangkan untuk penerima bantuan website terdapat 100 UMKM yang terbagi ke dalam 6 komunitas. Pemerintah berharap dengan adanya program bantuan ini agar pelaku UMKM lebih semangat untuk mengembangkan usahanya agar bisa berkembang pesat.

Pengembangan UMKM yang beroperasi di Kota Palembang terus dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Palembang, seperti yang dikatakan oleh Ibu Ana selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang pada acara pemberian bantuan peralatan hibah dan launching website di Kota Palembang pada 24 Desember 2020 bahwa Pemkot Palembang selalu berusaha untuk merangkul seluruh pelaku UMKM yang ada di Kota Palembang dalam menghadapi persaingan dalam kemajuan teknologi serta meringankan beban dan kendala para pelaku UMKM yang sering dihadapi mereka seperti kekurangan bahan, alat, dan sebagainya. Namun, masih ditemukan kendala dalam pemberian bantuan ini, seperti adanya UMKM yang tidak dapat bantuan alat, kendala lainnya ialah masih terdapat UMKM yang berada di luar komunitas UMKM belum terdata di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang yang menyebabkan

mereka tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah baik itu bantuan berupa pembinaan, bantuan langsung tunai maupun non tunai.

Dampak yang dirasakan oleh para pelaku UMKM setelah mendapatkan bantuan tersebut sangatlah terbantu, dan membuat mereka semakin semangat dan termotivasi lagi untuk mengembangkan produk usahanya. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari program ini masih banyak kekurangan yang terjadi dan dampaknya belum dirasakan oleh sebagian pelaku UMKM seperti mereka yang tidak atau belum kebagian bantuan tersebut. Dengan demikian perlu adanya pengamatan lebih lanjut yang dilakukan untuk melihat sejauh mana program ini berdampak kepada pelaku UMKM tersebut. Oleh sebab itu peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Dampak Kebijakan Program Pemberian Bantuan Non Tunai Kepada Pelaku UMKM di Kota Palembang” untuk mengetahui bagaimana Dampak Kebijakan Program Pemberian Bantuan Non Tunai Kepada Pelaku UMKM di Kota Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Dampak Kebijakan Program Pemberian Bantuan Non Tunai Kepada Pelaku UMKM di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Dampak Kebijakan Program Pemberian Bantuan Non Tunai Kepada Pelaku UMKM di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari pengembangan ilmu diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu yang telah ada serta dapat dijadikan bahan rujukan atau tambahan wacana dalam mengetahui dan mempelajari dampak bantuan non tunai terhadap pelaku UMKM.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan mampu berguna bagi pelaku UMKM untuk memperoleh informasi terkait program bantuan non tunai yang ada di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Citra Dwi Agustin. (2019). *PENGARUH PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PERSEPSI KEMUDAHAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI DAN MANFAAT INFORMASI AKUNTANSI*.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dye, R. T. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Pearson Education, Inc. All.
- Hasmirah. (2017). *Pengaruh Bantuan Peralatan Pemerintah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Menengah Di Kecamatan Wara*. IAIN Palopo.
- Kawengian, D. D. V., & Rares, J. J. (2015). EVALUASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFFICKING) TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA. *Acta Diurna*, 4(5), 1–15.
<https://mataram.antaranews.com/berita/19352/kendaraan-bermotor-penyumbang-terbesar-pencemaran-udara-di-mataram>
- Krisnawati, D. (2018). Peran perkembangan teknologi digital pada strategi pemasaran dan jalur distribusi UMKM di Indonesia. *Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 6(1), 69–74.
- Lejiu, A., Masjaya, & Irawan, B. (2014). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu). *Jurnal Administrative Reform*, 2(4), 515–526.
- Lubis, T. A., & Junaidi. (2016). Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 163–174.
- Mariana, K., & Lida, R. (2015). Website sebagai Media Pemasaran Produk-Produk Unggulan UMKM di Kota Semarang. *JAM (Jurnal Aplikasi Manajemen)*, 13(2), 186–196. <https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/760>
- Mirani, D., Martina, & Aryansah, J. E. (2021). Implementasi Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Kuliner di Kota Palembang. *Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 38–46.
- Muhiddin, A. (2017). Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa di Kabupaten Gowa). In *Universitas Negeri Makassar*.
http://eprints.unm.ac.id/4365/1/AMIR_MUHIDDIN.pdf
- Nurahmawati, F., & Hartini, S. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Cibadak. *Program Mahasiswa Kreatif*, 4(2), 160–165. <https://doi.org/10.32832/pkm-p.v4i2.733>
- Pasolong, H. (2020). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. ALFABETA.
- Puspitasari, I. (2021). Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember. In *Universitas Jember*. Universitas Jember.
- Setiyawati, Y., & Hermawan, S. (2018). Persepsi Pemilik Dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Atas Penyusunan Laporan Keuangan. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 161–204.
<https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i2.6629>
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Di Indonesia. *Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.
- Sujarweni. (2021). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Widyastuti, P. (2017). *Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi*

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bidang Jasa. *Jurnal Online Nasional Dan Internasional*, 1(1), 50–63. www.temppo.co.id